

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik salah satunya mengenai asas keterbukaan yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah agar menjadi demokratis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori negara hukum dan teori negara demokrasi serta teori peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dalam bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara), melalui penyebaran kuisisioner, dialog publik melalui radio dan publik hearing (konsultasi publik). 2. Kendala dalam Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Faktor Internal, meliputi kapasitas keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar instansi terkait penyusunan Peraturan Daerah dan peran bapemperda dalam mengkaji Peraturan daerah sedangkan Faktor Eksternal, meliputi adanya partisipasi masyarakat, dukungan peran media dan konsultan akademis, solusinya adalah meningkatkan kapasitas keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar instansi terkait penyusunan Peraturan Daerah, peran bapemperda dalam mengkaji Peraturan daerah, partisipasi masyarakat, peran media dalam mempublikasikan proses peraturan daerah dan menambah konsultan akademisi yang berkompentensi dalam Proses pembentukan peraturan daerah.

Kata-kata kunci: Asas Keterbukaan; Pelaksanaan; Kendala.

ABSTRACT

The formation of laws and regulations is a condition in the context of national law development which can only be realized if supported by good methods. Indonesia is a state of law that has the obligation to implement good national law development, one of which is the principle of openness, namely the participation of the community in providing oral and / or written input in the mechanism of forming laws and regulations and the Regional Regulation of Central Java Province in order to be democratic.

The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the principle of openness in the Formation of Regional Regulations of Central Java Province in addition to knowing and analyzing the constraints in the implementation of the principle of openness in the formation of Regional Regulations of Central Java Province and how to overcome them.

This study uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively using the theories of the rule of law and the theory of the democratic state and the theory of legislation.

The results of this study are: 1. The implementation of the principle of openness in the formation of the Regional Regulation of Central Java Province is in the form of gathering people's aspirations (romance nets), through the distribution of questionnaires, public dialogue via radio and public hearing (public consultation). 2. Constraints in the Implementation of the principle of openness in the formation of Regional Regulations of Central Java Province are Internal Factors, including regional financial capacity, skills of local government officials, coordination between agencies related to the preparation of Regional Regulations and the role of Bapemperda in reviewing local Regulations while External Factors, including community participation , support for the role of the media and academic consultants, the solution is to increase local financial capacity, the skills of local government officials, coordination between agencies related to the preparation of regional regulations, the role of regional regulation bapemperda in reviewing local regulations, community participation, the role of the media in publicizing local regulatory processes and adding consultant consultancy competence in the process of forming local regulations.

Keyword: Transparency Principle; implementation; Problem.